

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Puskesmas Mojopurno dapat disimpulkan untuk pengelolaan perbekalan farmasi yang ada di Puskesmas Mojopurno sudah sesuai dengan Permenkes No.74 Tahun 2016 pada pengelolaan sediaan farmasi.
2. Ada beberapa kegiatan pelayanan farmasi klinik di puskesmas mojopurno yang belum sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu :
 - a. Tidak dilakukan visite pasien
 - b. Tidak dilakukan PTO (Pemantauan Terapi Obat)Dua kegiatan pelayanan farmasi klinik tersebut tidak dilakukan karena Puskesmas Mojopurno merupakan puskesmas non rawat inap sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan tersebut. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik lainnya sudah sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

B. Saran

1. Merencanakan anggaran dana belanja untuk pembelian alat farmasi terutama mortir untuk pembuatan puyer karena ada beberapa pustu dan polindes alat kefarmasiaannya sudah tidak layak.
2. Menyediaan kartu stok dan etiket pada Pustu Tempursari.
3. Penambahan tenaga teknis kefarmasian untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Mojopurno.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 2016. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2019. *Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019. Jakarta: Depkes RI.
- Departemen Kesehatan RI. 2015. *Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015. Jakarta: Depkes RI.
- Anonim. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim. 2009. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2009. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Anonim. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/MENKES/PER/V/2011, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta